

**KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUARA ENIM
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH**



Skripsi Oleh
RISKA BERLIANA PUTRI
01031181419015
AKUNTANSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUARA ENIM
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH

Disusun oleh :

Nama : Riska Berliana Putri
NIM : 01031181419015
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

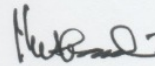
Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 15 Maret 2019

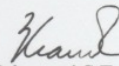
Ketua



Drs. H. Burhanuddin, M., Ak, CA
NIP 19580828 198810 1 001

Tanggal: 18 Maret 2019

Anggota



Eka Meirawati S.E., M.Si, Ak CA
NIP 19690525 199603 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Kinerja Keuangan Kabupaten Muara Enim

Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah

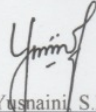
Disusun oleh:

Nama : Riska Berliana Putri
NIM : 01031181419015
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Maret 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 27 Maret 2019

Ketua,



Dr. E. Yugnaini, S.E., M.Si., Ak
NIP 19770417 201012 2 001

Anggota,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak CA
NIP 19690525 199603 2 001

Anggota,



Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak
NIP 19670701 199203 2 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Si., Ak CA
NIP 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Berliana Putri
NIM : 01031181419015
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

Kinerja Keuangan Kabupaten Muara Enim Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah

Pembimbing :

Ketua : Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA

Anggota : Eka Meirawati S.E, M.Si, Ak CA

Tanggal diuji : 27 Maret 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 27 Maret 2019
Pembuat Pernyataan

Riska Berliana Putri
NIM 01031181419015

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

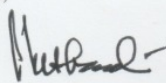
Nama : Riska Berliana Putri
NIM : 01031181419015
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Kinerja Keuangan Kabupaten Muara Enim Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 27 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA
NIP. 19580828 198810 1 001

Anggota,



Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak CA
NIP. 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak CA
NIP. 19730317 199703 1 002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dunia Bahagia Akhirat Syurga”

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

-HR.Ahmad, Thabrani, Daruqutni-

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan ALLAH SWT ”

-Q.S. Huud: 88-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku**
- **Saudaraku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **Kinerja Keuangan Kabupaten Muara Enim Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim sebelum dan sesudah pemekaran daerah dengan menggunakan analisis rasio. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Skripsi ini merupakan pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini adalah tanggungjawab penulis. Namun, diharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muara Enim agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berguna dimasa yang akan datang.

Inderalaya, 27 Maret 2019
Penulis,

Riska Berliana Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Ia berikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.
2. Rasulullah SAW yang telah mengajarkan perilaku terpuji salah satunya adalah kesabaran dan ketawakalan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis senantiasa berpegang pada ajaran tersebut untuk terus bersabar dan senantiasa berusaha dan bertawakal.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA dan Ibu Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Yulia Saftiana, S.E, M.Si., Ak selaku Penguji Skripsi yang selalu siap menasehati dan memberi arahan dalam memperbaiki skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi terimakasih telah memberikan ilmu pembelajaran, selama Saya kuliah di kampus tercinta.
9. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
10. Bapak Drs. H. Armelli Mendri, Ak., CA selaku Kepala Badan dan Bapak Drs. H. Anwar Prabujaya, MMB selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Muara Enim

11. Bapak Fadli selaku Pegawai BPKAD Kabupaten Muara Enim
12. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sugiyono(Almarhum) dan Ibu Sri Sulastri, yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan membiayai selama menuntut ilmu serta selalu memberikan semangat dan doa yang tulus untuk keberhasilan anak-anaknya.
13. Saudara-Saudaraku, Ayukku Evi Susiana, Kakakku Feril Mariansa, Kak Riski Satria Pratama dan Adikku Serli Permatasari yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan doa. Semoga kita bisa membahagiakan ayah dan ibu di dunia dan akhirat.
14. Keluarga besarku yang telah banyak memberikan semangat dan do'anya.
15. Sahabat-sahabatku tersayang Sosialita (Maharani, Lam Lam Deswinskyah, Wenti Rejasuari, Harjanti Mayang Lestari, Agustina Aisyah, dan Intan Gea Viranty) yang telah banyak memberikan doa, semangat dan dukungan. Terima kasih sudah membuat perkuliahan ini menjadi lebih indah dan menyenangkan. Semoga kita dapat menjadi sahabat dunia dan akhirat, sukses untuk kita semua.
16. My Best Partner Tedy Setiawan, terima kasih sudah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis, telah banyak memberi motivasi, dan doa selama ini.
17. Seluruh teman seperjuangan Akuntansi 2014 yang selalu memberikan semangat selama awal perkuliahan hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
18. Teman-temanku Yeshinta Valenia, Malinda Safitri, Siska Widya Sari, Reza Octavia, Denysa Nur Aulia, Siska Nedita Puspa, terima kasih selama ini atas dukungan dan semangat luar biasa kalian.
19. Almamaterku sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan
20. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini

Inderalaya, 27 Maret 2019

Penulis

Riska Berliana Putri

RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa : Riska Berliana Putri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 03 Januari 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Desa Tegal Rejo RT 3B RW 1 Tanjung Enim,
Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
Alamat Email : riskaberlianaputri@ymail.com

Pendidikan formal :
Taman Kanak-kanak : TK Aisyiyah
Sekolah Dasar : SD Negeri 02 Tanjung Enim
SLTP : SMP Negeri 01 Lawang Kidul
SLTA : SMAN 1 Unggulan Muara Enim
S-1 : Universitas Sriwijaya
Pelatihan/Kursus : 1. Brevet Pajak A dan B Terpadu (IAI Sumsel)
Pengalaman Organisasi : 1. Anggota BO Ukhuwah FE UNSRI 2014-2016
2. Anggota IMMETA 2014-2016

ABSTRACT

FINANCIAL PERFORMANCE OF MUARA ENIM REGENCY BEFORE AND AFTER REGIONAL EXPANSION

By:

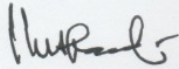
Riska Berliana Saputri;
Drs. H. Burhanuddin, M.Acc, Ak CA;
Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak CA

This study aims to measure the financial performance of Muara Enim Regency before and after regional expansion with Pemukal Abab Lematang Ilir (PALI) regency. This study which is a descriptive qualitative research, used analysis of data based on Muara Enim's Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget Report in 2010-2012 budgeting year before expansion and 2014-2016 budgeting year after expansion. The results of research shows that in the financial independence ratio before expansion is 7.32% and after expansion is 9.27%, which is mean it's in the same low category. For compatibility ratio shows the priority of expense is used for regular expense rather than for development expense. Afterwards for the efficiency ratio, it's categorized in the same category which is less efficient. The result of effectiveness ratio included in very effective category with 113.25% before expansion and 96.39% included in less effective category after expansion. And for growth ratio before expansion shows positive growth with 16.51%, meanwhile after expansion with 14.09% means a negative growth.

Keywords: *Performance, Realization of Revenue and Expense Budget Report, Financial Independence Ratio, Compatibility, Efficiency, Effectiveness and Growth.*

Head,

Member,



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak. CA
NIP 19580828 198810 1 001



Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak CA
NIP 19690525 199603 2 001

Head of Accounting Department,



Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak CA
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRAK

KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUARA ENIM SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH

Oleh:

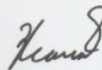
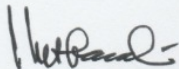
Riska Berliana Putri;
Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA;
Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah dengan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggunakan analisis rasio keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2010-2012 sebelum pemekaran dan tahun anggaran 2014-2016 sesudah pemekaran daerah. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan sebelum pemekaran sebesar 7,32% dan sesudah pemekaran 9,27% artinya sama-sama dalam kriteria rendah sekali. Untuk rasio keserasian menunjukkan bahwa belanja diprioritaskan untuk belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Kemudian untuk rasio efisiensi termasuk dalam kriteria yang sama yaitu kurang efisien. Hasil analisis rasio efektivitas termasuk dalam kriteria sangat efektif sebesar 113,52% sebelum pemekaran dan 96,36% dalam kriteria kurang efektif setelah pemekaran. Dan untuk rasio pertumbuhan sebelum pemekaran menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 16,51% sedangkan setelah pemekaran sebesar -14,09% yang artinya mengalami pertumbuhan yang negatif.

Kata Kunci: Kinerja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rasio Kemandirian, Keserasian, Efisiensi, Efektivitas dan Pertumbuhan

Ketua,

Anggota,



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak CA
NIP 19580828 198810 1 001 NIP 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E, M. Acc, Ak CA
NIP. 19730317 199703 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RIWAYAT HIDUP	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metodologi Penelitian	7
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5.2 Rancangan Penelitian	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Data	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.5 Definisi Operasional Variabel	9
1.5.6 Metode Analisis Data	10
1.6 Sistematika Penulisan	12

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori	14
2.1.1. Teori Kinerja (<i>Performance Theory</i>)	15
2.1.2. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	18
2.2. Studi Pustaka	20
2.2.1 Pengukuran Kinerja	21
2.2.2 Efisiensi dan Efektivitas	21
2.2.3 Pemekaran Daerah	23
2.2.3.1 Pengertian Pemekaran Daerah	23
2.2.3.2 Tujuan Pemekaran Daerah	24
2.2.3.3 Dasar Hukum Pembentukan Daerah Otonom	25
2.2.4 Penganggaran Sektor Publik	25
2.2.4.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik	25
2.2.4.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	26
2.2.5 Keuangan Daerah	27
2.2.5.1 Pengertian Keuangan Daerah	27
2.2.5.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah	28
2.2.6 Analisis Rasio Keuangan	29
2.3 Penelitian Terdahulu	36
2.4 Kerangka Konseptual	39

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
3.1.1 Sejarah Umum Kabupaten Muara Enim	40
3.1.2 Letak Geografis	41
3.1.3 Visi dan Misi	42
3.2 Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD)	44
3.2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Muara Enim ...	45
3.3 APBD Kabupaten Muara Enim	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil	49
------------------	----

4.1.1	Analisis Rasio Keuangan	49
4.1.1.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	49
4.1.1.2	Rasio Keserasian.....	51
4.1.1.3	Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran	53
4.1.1.4	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	55
4.1.1.5	Rasio Pertumbuhan	56
4.2	Pembahasan	62
4.2.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	62
4.2.2	Rasio Keserasian	65
4.2.3	Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran	68
4.2.4	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	71
4.2.5	Rasio Pertumbuhan	74
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan	84
5.2.	Keterbatasan Penelitian	85
5.3.	Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA		
		87
 LAMPIRAN		
		90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah	32
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	33
Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	34
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012	50
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016.....	50
Tabel 4.3 Kriteria Kemandirian Keuangan	51
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Belanja Rutin terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012.....	52
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Rutin terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016.....	52
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012.....	52
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016.....	53
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012	54

Tabel 4.9	Perhitungan Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten Muara Enim Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016.....	54
Tabel 4.10	Kriteria Kinerja Efisiensi Penggunaan Anggaran	54
Tabel 4.11	Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012.....	55
Tabel 4.12	Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016	56
Tabel 4.13	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	56
Tabel 4.14	Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012	57
Tabel 4.15	Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016	58
Tabel 4.16	Perhitungan Pertumbuhan Total Pendapatan Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012.....	59
Tabel 4.17	Perhitungan Pertumbuhan Total Pendapatan Kabupaten Muara Enim Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016.....	59
Tabel 4.18	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012.....	60

Tabel 4.19 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kabupaten Muara Enim Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016.....	60
Tabel 4.20 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran Daerah Tahun 2010-2012	61
Tabel 4.21 Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Muara Enim Sesudah Pemekaran Daerah Tahun 2014-2016	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4	Kerangka Konseptual	39
Gambar 3.2.1	Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Muara Enim	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2012	91
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2012	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang diganti menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang saat ini menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah. Penyelenggara fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah agar pemerintah daerah dapat

membiyai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Pada dasarnya sumber-sumber penerimaan di antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Misalnya saja, ada daerah yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah lainnya yang menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya.

Salah satu dampak yang muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas adalah terjadinya pemekaran daerah. Berdasarkan pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Tujuan pemekaran diharapkan mampu mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah saja. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah-daerah yang belum berkembang tersebut.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah yang telah mengalami pemekaran sebanyak dua kali. Pertama pemekaran yang terjadi di Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, maka statusnya telah ditingkatkan menjadi Pemerintah Kota Prabumulih. Kedua pemekaran yang terjadi di Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 11 Januari 2013 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Sumatera Selatan. Ini berarti secara resmi Kabupaten Muara Enim terpecah menjadi tiga Kabupaten sebagai Otonomi Daerah Baru. Dimana Kabupaten Muara Enim sebagai daerah Induknya, Kota Prabumulih dan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebagai daerah anaknya.

Terbentuknya daerah baru setelah pemekaran daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian dan sumber-sumber pendapatan bagi daerah induknya. Daerah yang baru terbentuk akan menerima sebagai aset dari wilayah induknya untuk menjalankan roda pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 Tentang pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: “Barang milik daerah atau yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk”. Akibat penyerahan aset sebagaimana dijelaskan dalam Kepmendagri di atas menyebabkan berkurangnya

aset dan sumber-sumber pendapatan Kabupaten Muara Enim. Salah satunya adalah berkurangnya penerimaan PAD yang akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tersebut dan pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan Kabupaten yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim, 2012).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Latar belakang masalah dalam studi akuntansi dan keuangan banyak bersumber dari teoritis dengan melakukan *review* terhadap penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya (Hidayat, Pratomo, & Hartjito, 2007) meneliti tentang *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara* menghasilkan kesimpulan bahwa dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, Kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Humbang

Hasundutan, dan Pakpak Barat secara rata-rata mengalami pertumbuhan pengeluaran lebih besar dari pertumbuhan penerimaan. Sedangkan Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Padang Sidempuan mengalami pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pengeluarannya. Dilihat dari indikator kinerja PAD, kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan PAD yang positif tetapi masih relatif kecil peranannya dalam struktur APBD. Dari peta kemampuan keuangan (metode kuadran) mengindikasikan ketidakpastian masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

Selain itu, dalam penelitian (Mariani, 2013) tentang *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah; 2). Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah; 3). Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah; 4). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang dilakukan oleh (Mariani, 2013) adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sedangkan objek penelitian ini adalah Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan informasi di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai **“Kinerja Keuangan Kabupaten Muara Enim Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di ungkapkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah dengan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengukur bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah dengan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI).

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan nantinya penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kinerja keuangan, mengenai efektivitas atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Manfaat Praktis, diharapkan ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim di periode selanjutnya.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muara Enim. Untuk mempermudah masalah dan agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah dengan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2012 sebelum pemekaran daerah dan tahun 2014-2016 sesudah pemekaran daerah.

1.5.2 Rancangan Penelitian

Penelitian ini berupa studi deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dianalisis menggunakan rasio keuangan APBD yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan.

1.5.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:402). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan, literatur kuliah, makalah, jurnal, dan koran serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapat melalui media perantara atau yang telah diolah. Data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dalam hal ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2012 sebelum pemekaran daerah dan tahun 2014-2016 sesudah pemekaran daerah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Dalam hal ini berupa dokumen-dokumen Laporan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim tahun Anggaran 2010 sampai 2016.

b) Studi Kepustakaan

Penelitian menggunakan pustaka sebagai sumber data dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang ada. Studi kepustakaan adalah dengan menggunakan, mengumpulkan, dan mempelajari literatur-literatur dan buku-buku serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.5 Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya permasalahan yang di angkat, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian operasional variabel sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batasan-batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan asli daerah.

5. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi atau Belanja Modal secara optimal.

6. Rasio Petumbuhan

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya.

1.5.6 Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggunakan rasio keuangan untuk mengukur

kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum pemekaran tahun 2010-2012 dan setelah pemekaran tahun 2014-2016. Dilakukan dengan cara menghitung rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah

a. Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

b. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Total Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3) Rasio Keserasian

a. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

4) Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan PAD

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_{n-1}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

1.6 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara keseluruhan dari isi skripsi ini, penulis akan menyajikannya dalam 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab-bab lainnya, maka dari itu dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI DAN STUDI PUSTAKA

Pada bab ini akan dikemukakan dan diuraikan berbagai teori yang digunakan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan dijelaskan secara singkat mengenai sejarah Kabupaten Muara Enim, kondisi geografis, kependudukan, serta struktur pemeritahan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim Sebelum Pemekaran tahun 2010-2012 dan Sesudah Pemekaran Daerah tahun 2014-2016 dengan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir menggunakan analisis rasio keuangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran, serta implikasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait dengan masalah kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Einsenhardt, K. M. 1989, January. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14,p.57-74.
- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: EKONISIA
- Halim, A. d. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harryanto, E., Kartini, H., & Haliah. 2014. Budget Process of Local Government in Indonesia. *Society of Interdisciplinary Business Research*,32.
- Hidayat, P., Pratomo, W. A., & dan Hartjito, D. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 213-222.
- Jensen, M. C., & Meckling, W.H. 1976, October. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3, p. 305-360.
- Mahmudi, 2013. *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daaeraah Sesudah Pemekaraan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Artikel Ilmiah*.
- Miranda , dan Tanggal, Amin Widjaja.2003. “ A to Z”. Jakarta : Harvindo.

- Mulatsih, Endang Sri. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Setelah Pemekaran Daerah. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. Vol 4 No. 1
- Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, Erna dan Putra, Wayan. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 5.3 , 1767-1795.
- Renyowijoyo, M. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*(2 ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Sumatera Selatan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri dalaam Negeri No. 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Robertson, Gordon. 2002. "Revie Kinerja". *Lokakarya Revie Kinerja*. BPKP dan Executive Education.
- Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi, 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 1 No. 1, 31-42.
- Setiawan. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susanti, 2014. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara. *JEP*. Vol. 3, No 2.

Syamsul, Hadi. 2006. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Malang: UMM Press.